

## Peran Indeks Kebahagiaan (*Human Happiness Index*) Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Indonesia

Sentia Indah<sup>1</sup>, Lince Magriasti<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

e-mail: [sentiaindah2000@gmail.com](mailto:sentiaindah2000@gmail.com), [lincemagriasti@fis.unp.ac.id](mailto:lincemagriasti@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Peran Indeks Kebahagiaan (*Human Happiness Index*) dalam Perumusan Kebijakan Publik di Indonesia. Jenis penulisan artikel ini menggunakan metode literature review. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya, suatu negara dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan pada objek ekonomi seperti GDP, inflasi, ds yang kemudian mengabaikan pemerataan ekonomi. Oleh sebab itu, perlunya melakukan pengukuran terkait keberhasilan pembangunan melalui indikator kesejahteraan dengan indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan ini dapat menampilkan kepuasan sosial masyarakat berupa pelayanan public yang diberikan, rasa ekamanan, ds serta juga aspek ekonomi. Hasilnya, berbagai negara di dunia telah menggunakan indeks kebahagiaan ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan serta keberhasilan pembangunannya termasuk Indonesia dengan melakukan menggunakan 19 indikator yang tercakup dalam 3 dimensi kehidupan berupa dimensi Kepuasan Hidup (*Life satisfaction*), dimensi perasaan (*affect*), dan dimensi makna Hidup (*Eudaimonia*). Sehingga, indeks kebahagiaan ini dapat dijadikan acuan bagi para perumus kebijakan agar dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih baik dan tepat serta mengarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan negara indonesia.

**Kata Kunci:** *Indeks Kebahagiaan, Human Happiness Index, Keberhasilan Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik.*

### Abstract

This study aims to determine the role of the Human Happiness Index in the formulation of public policy in Indonesia. This type of article writing uses the literature review method. The results of this study indicate that in general, a country measures the level of development progress and the welfare of its people based on economic objectives such as GDP, inflation, etc. which then ignores economic equality. Therefore, it is necessary to measure the success of development through welfare indicators with a happiness index. This happiness index can display the social satisfaction of the

community in the form of public services provided, a sense of security, etc. as well as economic aspects. As a result, various countries in the world have used this happiness index to measure the level of welfare and the success of their development including Indonesia by using 19 indicators that are covered in 3 dimensions of life in the form of the dimension of Life satisfaction, the dimension of feelings (affect), and the dimension of the meaning of Life (Eudaimonia). Thus, this happiness index can be used as a reference for policy makers in order to issue better and more appropriate policies and lead to the achievement of community welfare which can then increase the success of the development of the Indonesian state.

**Keywords:** *Human Happiness Index, Development Success, Public Welfare, Public Policy*

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan ataupun kemajuan suatu pembangunan di suatu negara merupakan cita-cita seluruh negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat negaranya. Setiap negara selalu berusaha merumuskan berbagai kebijakan public yang dapat memajukan pembangunan di negaranya agar tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat tercapai. Oleh karena itu, untuk dapat merumuskan berbagai kebijakan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan di suatu negara tersebut, maka pemerintahan suatu negara akan melakukan evaluasi terhadap kinerja atau pencapaian atas kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui berbagai indikator pengukuran. Pada umumnya, suatu negara dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan pada objek ekonomi yaitu salah satunya dengan mengukur GDP setiap daerah dan atau suatu negara serta pertumbuhan ekonominya.

Namun, pengukuran ini sering mengabaikan bagaimana pemerataan ekonomi masyarakatnya. Dimana, pendapatan perkapita suatu negara tidak berbanding lurus dengan tingkat pemerataan pendapat ekonomi masyarakatnya (Maruti, 2021). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran pendapatan per kapita negara-negara di ASEAN 2013-2014, dimana pendapatan perkapita tertingginya yaitu Singapura dan Brunei Darussalam. Namun, pada hasil pengukuran gini rasionya yaitu ukuran untuk melihat seberapa besar ketimpangan antara masyarakat yang penghasilan tinggi dan rendah di suatu negara tersebut. Maka, dari hasil pengukuran gini ratio negara ASEAN yang dilakukan pada tahun 2012 yaitu Singapura lebih besar dibandingkan Indonesia yaitu 0,473 dan 0,416 (Wibowo, 2016). Padahal Indonesia secara pendapatan perkapita lebih rendah daripada Singapura. Artinya, ketimpangan antara orang kaya dan miskin di negara Singapura lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia. Hal ini menunjukkan di Singapura ketidakmerataan ekonominya jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga, indikator pengukuran perkapita melalui GDP ini tidak dapat menjadi acuan dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakatnya, karena tidak sejalan antara peningkatan GDP dengan kesejahteraan.

Selain itu, pengukuran dengan GDP ini juga mendapatkan berbagai kritikan dari para pengamat ekonomi salah satunya disampaikan oleh (White, 2015) bahwasanya GDP tidak dapat menjelaskan terkait adanya transaksi seperti pasar gelap serta kegiatan rumah tangga yang dihasilkan yang mana ikut serta dalam pengeluaran nasional. Kemudian GDP ini, tidak memperhatikan aspek dampak dari hasil proses produksi suatu perusahaan seperti polusi yang ditimbulkan. Sehingga menurut White GDP ini bahkan tidak dapat mengukur kualitas kehidupan suatu warga masyarakat di suatu negara tersebut. Adapun hal ini didukung oleh Robert Kennedy bahwasanya GDP ini tidak mampu sepenuhnya menggambarkan bagaimana keadaan kesehatan dan pendidikan anak-anak, kebahagiaan pasangan suami istri, kecerdasan pejabat, integritas para pelayanan public di suatu negara, dls ( Oshi & diener, 2014). Sehingga, berdasarkan beberapa hal tersebut maka pengukuran pembangunan suatu negara tidak lagi relevan jika hanya berdasarkan aspek ekonomi (objektif) atau moneter saja yang diukur. Oleh sebab itu perlu adanya pengukuran dari sudut pandang subjektif atau non ekonomi yaitu berupa indek kebahagiaan sebagai salah satu indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Sehingga suatu negara dapat melihat dan menilai secara keseluruhan dari berbagai aspek kehidupan, dengan demikian perumusan kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah tidak saja berfokus pada peningkatan ekonomi semata tanpa menghiraukan kesejahteraan masyarakat di suatu negara tersebut.

Dalam proses meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara, maka salah satu instrumennya adalah melalui perumusan berbagai kebijakan public terkait upaya dalam mewujudkan keberhasilan suatu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Sehingga, perumusan berbagai kebijakan public untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan ini perlu memperhatikan indek kebahagiaan atau human happiness indeks suatu negara. Hal ini agar kebijakan yang dirumuskan tersebut benar-benar sesuai berdasarkan berbagai aspek penting dari kehidupan masyarakat di suatu negara tersebut.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi yang mana salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga, pengukuran keberhasilan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat menggunakan happiness index atau indeks kebahagiaan yang sejalan dengan salah satu tujuan negara Indonesia sendiri serta Indonesia saat ini sudah menggunakan pengukuran menggunakan indeks kebahagiaan tersebut. Hal ini dikarenakan indonesia mengikuti perkembangan dunia internasional dalam menggunakan pengukuran kesejahteraan masyarakat. Maka, saat ini Indonesia telah mulai bergerak dari pengukuran keberhasilan pembangunan nasional dan kesejahteraan berdasarkan pada aspek ekonomi ke indeks kebahagiaan. Namun, dalam hal ini aspek ekonomi tidak ditinggalkan begitu saja akan tetapi tetap digunakan dan dilengkapi dengan pengukuran indeks kebahagiaan. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui terkait pengukuran keberhasilan pembangunan nasional dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penggunaan indikator kebahagiaan serta sejauh mana peran human happiness index ini dalam perumusan kebijakan publik.

## METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode literature review yaitu suatu bentuk penelitian yang mempelajari dan menganalisis secara ilmiah dari berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel jurnal, dan buku online. Selanjutnya hasil dari penelitian dan analisis disintesis menggunakan metode naratif melalui pengelompokan informasi atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pengukuran Indeks Kebahagiaan (*Human Happiness Index*) di Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia memiliki cita-cita atau tujuan hidup salah satunya adalah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah demi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan salah satunya dilakukan berbagai bentuk jenis pengukuran demi didapatnya hasil atau evaluasi dari bagaimana kinerja pemerintah dalam periode waktu tertentu dalam upaya mewujudkan tujuan berupa mensejahterakan masyarakatnya. Melalui pengukuran-pengukuran tersebut sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah serta membantu pemerintah dalam merumuskan kembali berbagai kebijakan yang lebih baik yang sesuai dan mengarahkan pada upaya pencapaian tujuannya.

Maka, indikator pengukuran kesejahteraan yang disusun tidak saja mengukur terkait bagaimana tingkat kesejahteraan secara objective atau ekonomi saja namun bahkan arahnya lebih besar terhadap pengukuran tingkat kesejahteraan secara subjektif atau kebahagiaan. Selain itu, indikator kebahagiaan dari perspektif para psikolog positif menyatakan bahwasanya indicator kebahagiaan tidak hanya membahas terkait pengukuran pada evaluasi secara subjective terhadap keadaan hidup yang menyenangkan (*pleasant life*) serta kehidupan yang baik (*being-well life*) akan tetapi juga kebermaknaan kehidupan (*meaningful life*) (BPS, 2021).

Adapun indikator kebahagiaan atau human happiness index disampaikan oleh (Kapteyn et al., 2004) yaitu suatu bentuk ukuran yang menampilkan tingkat kesejahteraan dikarenakan kebahagiaan merupakan cerminan dari bentuk kesejahteraan yang telah didapatkan oleh seorang individu dalam kehidupannya. Indikator kebahagiaan yang telah dilakukan penyusunan tersebut merupakan bentuk pengukuran yang menggambarkan level kesejahteraan secara subjektif dalam beberapa aspek kehidupan yang dianggap sangat penting dan bermakna bagi banyak masyarakat ataupun penduduk suatu negara atau daerah ( Martin, 2012, OECD, 2011, 2013) dalam (BPS, 2021).

Penggunaan kata kebahagiaan atau happiness dalam pengukuran ini dipilih BPS dikarenakan alat survey yang digunakan berdasarkan pada penilaian secara objektif dan tingkatan kesejahteraan secara subjektif yang mana didalamnya telah tercakup tiga dimensi yang besar berupa bentuk evaluasi kondisi hidup masyarakat

yang dianggap sangat penting bagi kebanyakan penduduk, kemudian terkait *affect* atau keadaan emosional manusia, serta eudaimonia atau dipahami sebagai makna kehidupan. Maka dapat dipahami, bahwasanya pengukuran menggunakan indeks kebahagiaan ini merupakan bentuk evaluasi terhadap suatu keadaan yang objektif atau yang benar-benar terjadi yang meliputi sepuluh domain kehidupan, perasaan, dan makna hidup (BPS, 2021).

Penyusunan indikator kebahagiaan yang dilakukan oleh BPS telah mengikuti perkembangan yang ada di dunia internasional. Adapun indikator kebahagiaan yang telah disusun menjadi tiga dimensi pembagian tersebut juga bertujuan untuk menutupi kelemahan pada pengukuran secara objektif atau ekonomi, kemudian untuk dapat menyempurnakan penggunaan pengukuran dari indikator objektif atau ekonomi, serta indikator kesejahteraan ini menjadi suatu indikator yang dapat mengukur perkembangan dan keberhasilan suatu pembangunan nasional (Graham & Soumya Chattopadhyay, 2013; OECD, 2019; Stiglitz et al., 2009).

Oleh karena itu, BPS telah mengeluarkan pengukuran indikator kebahagiaan melalui 19 indikator yang dirangkum dalam bentuk tiga dimensi kehidupan yaitu :

1. Dimensi Kepuasan Hidup (*Life satisfaction*)

Pada dimensi ini kepuasan hidup dibedakan atas dua yaitu kepuasan hidup secara personal dan secara sosial. Indikator untuk sub dimensi kepuasan hidup secara personal terdiri dari :

- a. Pendidikan dan keterampilan,
- b. Pekerjaan/usaha/kegiatan utama
- c. Pendapatan rumah tangga,
- d. Kesehatan dan keadaan rumah
- e. Serta fasilitas rumah.

Adapun indikator untuk sub dimensi kepuasan hidup secara sosial terdiri dari :

- a. Keharmonisan keluarga,
- b. Ketersediaan waktu luang,
- c. Hubungan social,
- d. Keadaan lingkungan,
- e. Serta kondisi keamanan

2. Dimensi Perasaan (*Affect*). Adapun pada dimensi perasaan ini terdiri dari indikator sb :

- a. Perasaan senang,
- b. Tidak khawatir/ cepat,
- c. Serta Tidak tertekan.

3. Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Pada dimensi makna hidup ini memiliki beberapa indikator sb :

- a. Kemandirian,
- b. Penguasaan lingkungan,
- c. Pengembangan diri,
- d. Hubungan positif dengan orang lain,
- e. Tujuan hidup,

f. Dan penerimaan diri (BPS, 2021).

Di Indonesia, pengukuran indeks kebahagiaan telah dilaksanakan oleh pemerintah pada seluruh provinsi yang ada. Pada tahun 2013 dan 2014 pemerintah telah melakukan survei indeks kebahagiaan masyarakat dengan menggunakan 10 indikator kebahagiaan. Dimana, hasil survei tersebut menunjukkan bahwasanya terjadi peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat dari tahun 2013 sebesar 65, 11 menjadi sebesar 68, 28 di tahun 2014 atau terjadi peningkatan indeks kebahagiaan sebesar 3, 17 poin. Adapun tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2014 mengalami kenaikan secara keseluruhan pada seluruh poin indikator kebahagiaan tersebut yaitu peningkatan tertinggi berada pada aspek pendapatan rumah tangga sebesar 5,06 poin dan nilai terendah berada pada aspek keharmonisan keluarga yaitu sebesar 0,78 poin.

Kemudian, jika dilihat dari survey BPS tahun 2014 maka terdapat 3 provinsi dengan tingkat indeks kebahagiaan paling tinggi yaitu Kepri, Maluku, dan Kalimantan Timur, sedangkan tiga terendah adalah Sumbar, NTT, dan Papua. Maka, dari hasil tersebut dapat dipahami bahwasanya DKI Jakarta dengan pendapatan perkapita tertinggi tidak menjamin menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan paling tinggi pula. Sehingga, ini memperkuat argumen terkait bahwasanya tingginya pendapatan tidak menjamin kebahagiaan yang tinggi pula (BPS, 2015).

Maka, dalam penelitian yang dilakukan oleh (wibowo, 2016) didapati hasil bahwasanya pendapatan masyarakat tidak memiliki pengaruh kepada tingkat kebahagiaan. Kemudian, kesenjangan pendapatan masyarakat juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat. Sehingga, dapat dipahami bahwasanya kebahagiaan masyarakat Indonesia tidak hanya tergantung pada unsur ekonomi atau material saja. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat lebih mengarahkan rumusan kebijakan kedepannya dalam upaya meningkatkan pada beberapa aspek berupa kualitas kehidupan keluarga, sosial dan aspek lainnya.

Selanjutnya, pengukuran indeks kebahagiaan atau human happiness index di Indonesia pada tahun 2017 dan 2021 telah menggunakan pengukuran yang berdasarkan 19 indikator kebahagiaan yang tercakup dalam 3 dimensi kehidupan yaitu dimensi Kepuasan Hidup (*Life satisfaction*), dimensi perasaan (*affect*), dan dimensi makna Hidup (*Eudaimonia*). Adapun hasil dari pengukuran indeks kebahagiaan pada tahun 2017 dan 2021 yaitu didapati bahwa tingkat kebahagiaan pada tahun 2021 lebih tinggi daripada indeks kebahagiaan pada tahun 2017 yaitu sebesar 71, 49 tahun 2021 dan 70,69 pada tahun 2017 dalam skala pengukuran 0-100. Hal ini menandakan bahwasanya terjadi peningkatan poin sebesar 0,8 poin dari 2017 ke 2021 tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya apabila dilihat secara per dimensinya, maka indeks kebahagiaan dari dimensi kepuasan hidup yaitu indikator kepuasan hidup personal sebesar 70, 26 sedangkan untuk indikator kepuasan hidup social sebesar 80,07. Tingkat kebahagiaan untuk indeks dimensi perasaan sebesar 65, 61 dan indeks dimensi makna hidup sebesar 73, 12 (BPS, 2021).

Berikut dapat kita amati beberapa gambar terkait tingkatan indeks kebahagiaan tahun 2021 sebagai berikut :





Gambar 2.1. Perkembangan Indeks Kebahagiaan Indonesia, 2017 dan 2021



Sumber : (BPS, 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara umum dapat kita pahami bahwasanya telah terjadi peningkatan kebahagiaan masyarakat Indonesia pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dimana pada tahun 2021 kita bahkan sedang menghadapi masa pandemic covid-19, artinya kondisi pandemic masa itu tidak mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat karena indeks kebahagiaan pada tahun 2021 lebih tinggi daripada tahun 2017.

**b. Pergeseran Kebijakan Publik dari Pendekatan Ekonomi ke Pendekatan Kebahagiaan (Happiness)**

Kebijakan public dengan pendekatan ekonomi saat ini mulai tergeser dan dengan adanya pendekatan kebahagiaan, hal inikarena tujuan kebijakan public itu sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebijakan publik selama ini selalu mengarah pada aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar

rupiah, serta GDP yang kemudian melupakan aspek pemerataan pendapatan masyarakat. Terdapat banyak negara yang tidak terlalu mementingkan aspek pemerataan ekonomi ini, akibatnya indeks ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan penduduk. Sehingga, itulah mengapa pendekatan ekonomi dalam kebijakan public yang dilaksanakan selama ini telah dianggap gagal dalam melihat permasalahan masyarakat atau penduduk secara nyata (Maruti, 2016).

Berdasarkan Laporan Kebahagiaan atau *World Happiness Report (WHR)* yang dilakukan oleh *Sustainable Development Solutions Network* yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2020 yang mana survei ini telah dilakukan selama 3 tahun dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Maka, ditemui bahwasanya pada laporan kebahagiaan yang ke delapan ini dari 156 negara di dunia negara paling bahagia adalah negara Finlandia. Negara Finlandia menduduki posisi sebagai negara paling bahagia selama tiga tahun secara berurutan dengan tingkat skor sebesar 7.809 dalam skala 0-10. Hal ini terjadi karena penduduk Finlandia menikmati berbagai fasilitas pelayanan public yang tinggi, pemberian keamanan kepada masyarakat yang baik, serta kualitas hidup yang baik dengan tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan masyarakatnya yang rendah. Adapun beberapa negara lain yang tingkat kemiskinana dan ketidaksamaarataanya yaitu Austria, swedia, belgia, swedia, norwegia, swiss, prancis, dan Inggris yang merupakan beberapa negara yang termasuk ke dalam *Cooperation and development (OECD)*.

Bahkan negara Amerika Serikat dengan GDP terbesar di dunia sejak tahun 1980 memiliki tingkat kebahagiaan sebesar 6.940 dalam skala 0-10 dan berada di posisi ke-18 dari seluruh negara di dunia. Sehingga, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Easterlin tahun 1974 yang kemudian hasil penelitiannya terkait indeks kebahagiaan Amerika Serikat dikenal dengan *Easterlin Paradox* atau *Paradox of Happiness* atau *Income Paradox* menyatakan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan tidak menjamin terjadinya peningkatan kebahagiaan seseorang. Hal ini karena kebahagiaan tidak selalu diukur dengan pendapatan namun terdapat aspek lain diluar pendapatan yang berpengaruh atas kebahagiaan seseorang. Pendapat ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Clark pada tahun 2008 yaitu ditemuinya fenomena *Easterlin Paradox* ini dimana terdapat factor lainnya selain pendapatan yang berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang dengan nilai 7.809 dalam skala 0-10 (Wahyudi dan Tiara, 2022).

Kemudian, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait kesejahteraan masyarakat maka ditemui bahwasanya di dalam proses perumusan kebijakan sangat penting memperhatikan tingkat kesejahteraan penduduk dan tidak hanya sebatas memperhatikan terkait aspek ekonomi atau moneter saja namun juga perlu memperhatikan faktor non ekonominya. Adapun (Kapteyn et al, 2010) dalam (BPS, 2017) memaparkan bahwasanya indeks kebahagiaan digunakan sebagai pengukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan, hal ini dikarenakan kebahagiaan merupakan cerminan daripada tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh seorang individu. Oleh sebab itulah, mengapa penting nya para perumusan kebijakan memperhatikan



tujuan kebijakan untuk kesejahteraan penduduk atau masyarakat melalui pengukuran dengan menggunakan indeks kebahagiaan masyarakat atau penduduk tersebut.

Pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan indeks kebahagiaan atau *happiness index* sudah mulai menjadi perhatian para pengambilan kebijakan saat ini. Dengan adanya ekonomi kebahagiaan atau *happiness index* ini bukan serta merta menghapuskan sistem pengukuran secara ekonomi berupa pendapatan namun ikut menyempurnakan atau melengkapi beberapa indikator non ekonomi yang selama ini tidak terlihat dan tidak digunakan, sehingga dengan adanya pengukuran dari aspek ekonomi dan nonekonomi ini nantinya akan saling melengkapi yang tujuan akhirnya adalah selain untuk pembaharuan ilmu ekonomi sendiri juga untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya, kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih baik dan tepat pula terkait indeks kebahagiaan yang kemudian indeks kebahagiaan ini sebagai refleksi dari tingkat kesejahteraan suatu penduduk yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Wahyudi dan Tiara, 20121).

Adapun salah satu negara yang sangat memperhatikan tingkat kebahagiaan ini sebagai pengukuran kesejahteraan dan keberhasilan pembangunannya melalui berbagai perumusan kebijakan public yang dikeluarkan yaitu seperti Negara Uni Emirat Arab (UEA). Negara UEA membuat kebijakan terkait dibentuknya dua kementerian baru yaitu Kementerian Kebahagiaan (*Minister of State For happiness*) dan kementerian Toleransi (*Minister Of State For Tolerance*) yang dinyatakan merupakan satu-satunya yang ada di dunia yang terkhusus hanya untuk mengurus masalah kebahagiaan masyarakatnya yang memiliki tujuan agar berbagai kebijakan negara untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik dan masyarakat puas akan kebijakan tersebut. Adapun kebahagiaan ini sebagai suatu bentuk pendekatan terbaru dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara yang tidak hanya berbicara secara kuantitatif seperti pendapatan, inflasi, kemiskinan, dls namun melewati batas-batas ekonomi tersebut (Dombusch, dkk, 1998).

Kemudian, terdapat negara Bhutan yang menampilkan bentuk kebijakan public yang sangat mengutamakan kebahagiaan yaitu berupa bentuk kebijakan public yang memfokuskan pada empat prinsip berupa adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, adanya konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan tata pemerintahan yang baik. Bagi negara Bhutan kebahagiaan meruoakan barang public sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab dalam membuat lingkungan yang dapat mencapai GHN sebagaimana yang sudah ada dalam konstitusi negara tersebut (Togbay et al, 2011).

Adapun negara Skandinavia juga membuat model kebijakan untuk masyarakatnya agar tercapai kebahagiaan berupa memberikan asuransi kepada warga yang tidak bekerja, memberikan berbagai bentuk kebijakan untuk warga yang tidak bekerja, adanya tunjangan bagi anak, integrasi program asuransi dan tunjangan anak serta membuat program yang disesuaikan dengan para penerimanya (*tailored programs*) serta imigran yang tidak bekerja pun diberikan program pelatihan pengalaman kerja untuk kemudian dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan

pekerjaan. Keseluruhan itu dilakukan agar tercapainya tingkat kebahagiaan yang tinggi bagi warganya dan terciptanya tingkat kesejahteraan yang tinggi pula dan bermuara pada keberhasilan negara tersebut dalam pembangunannya (Maruti, 2021).

Selain itu, di Indonesia juga sudah menggunakan indeks kebahagiaan ini dalam pengukuran keberhasilan pembangunan nasional. Yang mana pengukuran indeks kebahagiaan di negara Indonesia sejak tahun 2017 telah menggunakan indeks kebahagiaan dengan 19 indikator yang terbagi dalam 3 cakupan dimensi kehidupan yaitu dimensi Kepuasan Hidup (*Life satisfaction*), dimensi perasaan (*affect*), dan dimensi makna Hidup (*Eudaimonia*). Kemudian, selain data BPS terkait tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan juga dapat dilihat terkait indeks kebahagiaan dan hubungannya dengan kebijakan public ini dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Mulia, 2019) juga menemukan salah satunya bahwa terdapat pengaruh kebijakan public terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera. Artinya kebijakan public yang ada dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang salah satu indikatornya adalah kebahagiaan. Maka, dapat dipahami bahwa dengan adanya pengukuran indeks kebahagiaan ini dapat menjadi pedoman bagi para perumus kebijakan dalam membuat kebijakan public agar lebih baik lagi sehingga mampu meningkatkan kebahagiaan masyarakat suatu daerah tersebut yang berdampak pada pada meningkatkan kesejahteraan suatu daerah tersebut.

Kemudian, jika dilihat dari survey yang dilakukan oleh BPS dalam pengukuran indeks kebahagiaan di Indonesia melalui 19 indikator tersebut maka indeks kebahagiaan pada tahun 2017 dan 2021 yaitu didapati bahwa tingkat kebahagiaan pada tahun 2021 lebih tinggi daripada indeks kebahagiaan pada tahun 2017 yaitu sebesar 71,49 tahun 2021 dan 70,69 pada tahun 2017 dalam skala pengukuran 0-100 (BPS, 2021).

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional saat ini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja seperti dari GDP suatu daerah atau negara namun juga melihat bagaimana aspek non ekonomi masyarakat seperti kualitas kehidupan, kepuasan terhadap kebijakan yang ada, pelayanan publik, dls. Sehingga pemerintah dapat mengukur bagaimana tingkat kebahagiaan masyarakat yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan sehingga kebijakan public yang dihasilkan tersebut menjadi lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat, yang selanjutnya dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara. Artinya, pengukuran indeks kebahagiaan ini menjadi acuan bagi suatu daerah ataupun negara dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunannya serta di Indonesiapun saat ini pengukuran terhadap indeks kebahagiaan ini telah dilakukan semenjak tahun 2017 dengan 19 indikator yang tercakup dalam 3 dimensi kehidupan yaitu Kepuasan Hidup (*Life satisfaction*), dimensi perasaan (*affect*), dan dimensi makna Hidup (*Eudaimonia*).

## SIMPULAN

Mewujudkan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan negara termasuk salah satunya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu perlu bagi pemerintah melakukan berbagai kebijakan public yang dapat mengantarkan masyarakatnya mencapai kesejahteraan tersebut, selain itu dengan diperlukan evaluasi atau penilaian terhadap berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran indeks kebahagiaan masyarakat. Dimana dengan adanya pengukuran indeks kebahagiaan ini termuat berbagai indikator yang tidak saja terkait dengan ekonomi mata namun juga non ekonomis seperti kepuasan sosial masyarakat. Sehingga dengan adanya pengukuran kebahagiaan ini didapatkan pengukuran terkait keberhasilan ekonomi maupun non ekonomi. Yang aman ini nantinya dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat negara secara umum yang bermuara pada gambaran akan tingkat keberhasilan pembangunan nasional negara. Hal ini dilakukan setelah adanya kekecewaan para ahli ekonomi terkait pengukuran yang berdasarkan pada aspek ekonomi yang dianggap telah gagal dalam menangkap realitas permasalahan masyarakat secara umum. Karena ketika pertumbuhan ekonomi tercapai maka pemerataan ekonomi pun diabaikan. Artinya tidak terjadi perbandingan lurus antara peningkatan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itulah, berbagai negara di dunia mulai melakukan pengukuran dengan memasukkan aspek indeks kebahagiaan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang melalui hal tersebut akan didapati bagaimana kondisi tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara tersebut. Di Indonesia juga sudah menggunakan indeks kebahagiaan ini dalam pengukuran keberhasilan pembangunan nasional. Yang mana pengukuran indeks kebahagiaan di negara Indonesia sejak tahun 2017 telah menggunakan indeks kebahagiaan dengan 19 indikator yang terbagi dalam 3 cakupan dimensi kehidupan yaitu dimensi Kepuasan Hidup (*Life satisfaction*), dimensi perasaan (*affect*), dan dimensi makna Hidup (*Eudaimonia*). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengukuran indeks kebahagiaan ini sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan public, karena melalui pengukuran indeks kebahagiaan akan didapatkan berbagai indikator terhadap aspek ekonomi maupun kepuasan social yang akan ikut menampilkan seberapa tinggi tingkat kesejahteraan suatu negara dan keberhasilannya dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Jawa Barat. 2015. *Berita Resmi Statistik No. 13/02/32/Th. XVII*. Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Indeks Kebahagiaan 2017*. In *Indeks Kebahagiaan 2017*. Badan Pusat Statistik.
- <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/05/1f99cefd596c449b93405fcd/indeks-kebahagiaan-2017.html>

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Indeks Kebahagiaan 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley; and Startz, Richard. 1998. *Macroeconomics, 7th ed*. New York: McGraw Hill. hlm 20-37.
- Graham, C., & Soumya Chattopadhyay, M. P. 2013. The Easterlin and Other Paradoxes: Why Both Sides of the Debate May Be Correct. In *Etica e Politica*.15 (1).
- Kapteyn, A., Smith, J. P., & Soest, A. van. 2004. Life satisfaction. *Physiotherapy Practice in Residential Aged Care*, 71–83.
- Maruti, R. A. 2021. Kebahagiaan sebagai Pendekatan Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 290-305.
- Mulia, R. A. 2019. Influence Of Public Policy, Participation Of Community And Education Level To Public Welfare In Padang Pariaman District. *Jurnal El-Riyasah*, 10(1), 37-56.
- Oishi, S., & Diener, E. 2014. Can and Should Happiness Be a Policy Goal? *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 195-203.
- Organization for Economic Co-operation and Development OECD. 2019. Better Life Index: Definition and metadata. May, 1–8. <https://www.oecd.org/statistics/OECD-Better-Life-Index-definitions-2019.pdf>
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. 2009. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. SSRN Electronic Journal, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1714428>
- Tobgay, T., Dophu, U., Torres, C. E., & Na-Bangchang, K. 2011. Health and Gross National Happiness: review of current status in Bhutan. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 293-298.
- Wahyudi, H., & Tiara, A. 2022. Ketimpangan Pendapatan Penyebab Tidak Bahagia. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 125-138.
- White, M. D. 2015. *The Problems with Measuring and Using Happiness for Policy Purposes*. Virginia: Mercatus Center George Mason University.
- Wibowo, M. G. 2016. Kebijakan Pembangunan Nasional: dari Pertumbuhan (Growth) Menuju Kebahagiaan (Happiness). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(1), 223-239.